

Analysis of the Role of Social Services in Improving Community Welfare in Islamic Economic Studies (Case Study at the Office of Social Protection and Social Security in Mandailing Natal Regency)

Analisis Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kantor Dinas Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Mandailing Natal)

Sri Sudiarti¹⁾; Rina Sari²⁾

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id; ²⁾ linasari999p@gmail.com

How to Cite :

Sudiarti, S., Sari, R. (2022). Analysis of the Role of Social Services in Improving Community Welfare in Islamic Economic Studies (Case Study at the Office of Social Protection and Social Security in Mandailing Natal Regency). Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [30 Maret 2022]

Revised [3 April 2022]

Accepted [9 April 2022]

KEYWORDS

Social Service,
Community Welfare

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Meliputi Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Penanganan Fakir Miskin. Seiring dengan banyaknya kejadian bencana alam dan non alam yang terjadi di Mandailing Natal, maka peranan Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan non alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Sosial bidang Perlindungan Jaminan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana dan non alam di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Subjek penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

ABSTRACT

The Social Service is the implementing element of government affairs in the social sector. The Social Service is led by a Head of Service who is under and responsible to the Regent through the Regional Secretary. The Social Service has the task of assisting in the social sector, including Social Rehabilitation, Social Empowerment, Social Security Protection and Handling the Poor. Along with the many natural and non-natural disasters that occurred in Mandailing Natal, the role of the Social Service is very much needed in order to improve the welfare of the people affected by natural and non-natural disasters. This study aims to determine the role of the Department of Social Affairs in the field of Social Security Protection in improving the welfare of people affected by disasters and non-natural disasters in Mandailing Natal Regency. This study uses qualitative methods and the data used are primary and secondary data. The subject of the research was carried out at the Social Service of Mandailing Natal Regency.

PENDAHULUAN

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang "kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi Islam ,mengacu pada 5 prinsip maqashid syariah, yakni terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan dan terjaganya harta.

Ada berbagai hal yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain faktor sumber daya, faktor alam juga banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu yang berdampak buruk bagi kesejahteraan hidup manusia adalah bencana alam dan non alam. Seperti terjadinya banjir, gempa bumi, kebakaran dan bencana lainnya yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, yang berdampak psikologis terhadap manusia. Sehingga jika terjadi bencana alam dan non alam, masyarakat tidak dapat berbuat banyak dalam menggali dan memanfaatkan sumber potensi yang membuat kehidupan lebih sejahtera. Bencana alam dan non alam ini mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Karena bencana alam misalnya seperti banjir dan bencana non alam misalnya seperti kebakaran dapat mengakibatkan prekonomian mayarakat yang terdampak bencana akan lumpuh. Dengan keadaan seperti ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan makanan, minuman, pakaian dan juga bantuan tunai berupa uang . Untuk mengurangi beban masyarakat dan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan non alam, maka perlunya peran lembaga pemerintah untuk ikut andil dalam hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan non alam di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) Secara teoritis, salah satu karya ilmiah yang dapat menambah kontribusi akademis di bidang ilmu sosiologi ekonomi. (2) Secara praktis diharapkan dapat memberi kontribusi dan dasar pemikiran terhadap Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan non alam.

LANDASAN TEORI

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dna bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Program Dinas Sosial meliputi:

- a. Bidang Rehabilitasi Sosial
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang perlindungan dan jaminan sosial merupakan salah satu bidang yang penting di dalam Dinas Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengevaluasi perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban bencana alam
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari tiga seksi, yaitu:

- a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam Seksi ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam.
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Seksi ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana sosial.
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga Seksi ini mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Jaminan Sosial Keluarga.

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Bencana alam dan non alam juga sering terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, seperti bencana banjir, tanah laongsor dan kebakaran.

Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasana. Menyikapi adanya bencana alam dan non alam tersebut maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menugaskan Dinas Sosial bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan non alam berupa uang tunai. Adapun besarnya santunan yang diberikan bervariasi, yaitu mulai dari Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) s/d Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Dan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penerima bantuan korban bencana alam dan non amlam di Mandailing Natal adalah berjumlah 58 orang. Terdiri dari 54 masyarakat korban kebakaran, 2 masyarakat korban tertimpa pohon, dan 2 masyarakat korban banjir. Dengan total bantuan yang diberikan berjumlah Rp. 67.000.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) selama kurun waktu 2020 s/d 2021.

Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, diharapkan dapat membantu masyarakat kesulitan ekonominya. Mereka bisa menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000 atau Rp. 10.000.000 tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mereka juga bisa menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha. Yang nantinya diharapkan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca terjadinya bencana alam dan non alam tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penelitian deskriptif-kualitatif merupakan penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara peneliti dan informan. Analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik sebagai berikut: (1) Wawancara / *interview* adalah wawancara subjek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. (2) Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dan menggali data sekunder yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial. Salah satu bidang yang penting di dalam Dinas Sosial ini adalah bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengevaluasi perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban bencana alam
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Bencana alam dan non alam juga sering terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, seperti bencana banjir, tanah laongsor dan kebakaran.

Tanggap darurat merupakan serangkaian yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasana. Menyikapi adanya bencana alam dan non alam tersebut maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menugaskan Dinas Sosial bidang Pelayanan dan Jaminan Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan non alam berupa uang tunai. Adapun besarnya santunan yang diberikan bervariasi, yaitu mulai dari Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) s/d Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Dan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penerima bantuan korban bencana alam dan non amlam di Mandailing Natal adalah berjumlah 58 orang. Terdiri dari 54 masyarakat korban kebakaran, 2 masyarakat korban tertimpa pohon, dan 2 masyarakat korban banjir. Dengan total bantuan yang diberikan berjumlah Rp. 67.000.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) selama kurun waktu 2020 s/d 2021.

Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, diharapkan dapat membantu masyarakat kesulitan ekonominya. Mereka bisa menggunakan uang sebesar Rp. 5.000.000 atau Rp. 10.000.000 tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mereka juga bisa menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha. Yang nantinya diharapkan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca terjadinya bencana alam dan non alam tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sudah berperan cukup maksimal dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan non alam di Mandailing Natal. Dinas Sosial juga sudah menajalankan peran dan fungsinya secara maksimal, terkait dengan Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial juga sudah melaksanakan fungsinya dengan maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh peneliti dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal Dari tahun 2020 sampai tahun 2021 tercatat ada 58 masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam dan non alam di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan rincian sebanyak 54 masyarakat korban kebakaran, 2 masyarakat korban banjir dan 2 masyarakat korban tertimpa pohon. Dan semua korban bencana alam dan non alam ini mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Mandailing natal berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 untuk korban.

Saran

Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar tetap mempersiapkan Anggaran dalam APBD . Agar masyarakat yang menjadi korban bencana alam dan non alam bisa langsung mendapatkan bantuan setelah terjadi bencana alam dan non alam tanpa harus menunggu. Dan agar semua korban bencana alam dan non alam mendapatkan bantuan

DAFTAR PUSTAKA

Prihartini, S., Adara, R.A., & Khadijah, S. (2021). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Banjir dan Longsor. *Jurnal of Empowerment*, 2 (1), 76-88

Purwanto, G. (2020). Tata Kelola Bantuan Logistik Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mozaik*, 12 (2), 72-84

Nasrullah., Parpurno, E.T., & Prasetyo, J.N. (2021). Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir: Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana Di Kota Kendari Tahun 2017. *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2 (7), 25-38

Zai, E., Marpaung, K.B., & Silviani, E. (2021). Peranan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DI Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Government Opinion*, 6 (2), 90-97

Syamsudin, M. (2019). Efektivitas Kebijakan Penyaluran Logistik Bencana. *FOKUS*, 17 (2), 186-195

Sukmana, O. (2018). Pengetahuan Manajemen Bencana Dan Kearifan Sosial Di Kabupaten Malang. *SOSIO KONSEPSIA*, 7 (3), 190-204

Hamdan. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Lanjut Usia Di Kecamatan Blangkejeren). *UNIVERSITAS MEDAN AREA: Tesis*, 20-21

Suardi, D. (2021) Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6 (2)

Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 40 Tahun 2016

Rosmaida., Sudi, A., & Daud, Y. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tawalian. *MITZAL: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6 (1), 46-59.